

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 12 TAHUN 2023
PELAKSANAAN GOTONG ROYONG TINGKAT KOTA, GOTONG ROYONG TINGKAT
MANDIRI TINGKAT RUKUN TETANGGA (RT)/RUKUN WARGA (RW) DI KELURAHAN PIPA
REJA KECAMATAN KEMUNING KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS PASAL 2 AYAT 4)**

Oleh :

Nama : Sephia Amanda

NIM : 20.11.137

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

ABSTRACT

The culture of gotong royong is the culture of the ancestors of the Indonesian people which has been passed down from generation to generation as a habit that has become unifying in social life, even gotong royong has become a great strength of the Indonesian people in fighting colonialists and achieving independence.

Gotong royong is one of the characteristics of the Indonesian people and is also a national culture that has earned the Indonesian people praise. The method used is qualitative research. Qualitative research is an approach which is also called an investigative approach because researchers usually collect data by meeting face to face and interacting with people at the research site.

Mutual cooperation activities in Pipa Reja Village, Kemuning District, Palembang City are carried out once a month for 1 week in RW 007. However, the Chairman of RW 007 also invited the Chairman of RT 26 to participate in this mutual cooperation activity. This research activity was carried out on April 21 in RW 007, specifically RT 26.

Residents in Kemuning sub-district need to be aware of the importance of maintaining togetherness and cleanliness of the environment between residents because mutual cooperation creates togetherness. Researchers hope that the relevant apparatus can provide social control over the residents of Kemuning sub-district, and provide outreach so that they do not pollute the environment with rubbish.

Keywords: Implementation, Implementation of Mutual Cooperation

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara majemuk yang kaya akan berbagai ragam suku, bahasa, agama, kepercayaan, dan adat istiadat. Bangsa Indonesia memiliki 1340 suku, dan jumlah suku terbanyak berada di Pulau Jawa yang mencapai 41% dari total populasi suku. Indonesia juga memiliki 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu islam, protestan, katolik, hindu, budha, dan Konghucu.

Apabila dilihat dari sisi historis masyarakat Indonesia, keberagaman yang terdapat di setiap suku bangsa ini ditandai dengan latar belakang yang berbeda, tentunya kondisi ini menciptakan iklim kebudayaan yang berbeda. Nilai kebersamaan yang ada di Indonesia terkhusus nilai gotong royong sangat dibutuhkan dalam upaya menuju persatuan Indonesia. Salah satu nilai kebersamaan tersebut terdapat dalam budaya gotong royong.

Gotong royong sebagai solidaritas sosial mengandung dua pengertian, yaitu gotong royong dalam bentuk tolong menolong dan gotong royong

dalam bentuk kerja bakti. Keduanya merupakan sama-sama bertujuan untuk saling meringankan beban namun berbeda dalam hal kepentingan. Tolong menolong dilakukan untuk kepentingan perseorangan pada saat kesusahan atau memerlukan bantuan dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga pihak yang bersangkutan mendapat keuntungan dengan adanya bantuan tersebut, sedangkan kerja bakti dilakukan untuk kepentingan bersama sehingga keuntungannya pun dirasakan bersama baik bagi warga yang bersangkutan maupun orang lain walaupun tidak turut serta dalam kerja bakti.

Gotong royong sesungguhnya bukan hal yang asing lagi untuk kita bicarakan, karena gotong royong sendiri merupakan budaya yang sangat lekat dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Budaya gotong royong merupakan budaya nenek moyang bangsa Indonesia yang turun temurun dijadikan sebuah kebiasaan yang menjadi permersatu dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan gotong royong menjadi kekuatan besar bangsa Indonesia dalam melawan penjajah dan meraih kemerdekaan. Gotong royong adalah salah satu ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia

dan juga merupakan budaya bangsa yang membuat bangsa Indonesia mendapat pujian dari bangsa lain, karena Indonesia memiliki budaya yang sangat unik dan penuh dengan toleransi, tenggang rasa dan saling menghargai sesama manusia, gotong royong ini juga merupakan nilai luhur yang di gali dari nilai pancasila yang dijadikan sebagai kepribadian bangsa Indonesia.

Kegiatan tersebut hampir pudar dengan perkembangan zaman dan perilaku masyarakat kota yang cenderung individualisme. Gotong royong kembali digalak kan dalam rangka menjalin rasa kebersamaan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk bersama menjaga lingkungan hidup.

Oleh karena itu dikeluarkannya oleh Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Seiring dengan berkembangnya sebuah kota telah memberikan dampak cukup besar terhadap keseluruhan aktivitas kegiatan masyarakat, sosial-ekonomi-budaya. Dinamika perkembangan dan perubahan kota, bahwa konfrontasi norma traidisonal dengan norma modern menghasilkan realitas pada pertemuan norma masyarakat kehilangan landasan dasarnya untuk menjalani proses pembangunan, sementara di sisi lain norma-norma modern tidak sepenuhnya

diterima sebagai pedoman dalam melakukan proses pembangunan.

Sebagai tindak lanjut khususnya kota Palembang Pemerintah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tngkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).

Apabila mengacu kepada Peraturan Walikota (PERWALI) No. 12 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), bahwa kegiatan gotong royong dibidang kebersihan merupakan budaya masyarakat yang perlu terus dilaksanakan secara berkesinambungan, karena untuk mewujudkan visi Palembang Emas Darussalam 2023 melalui pemberdayaan masyarakat dan upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah, khususnya dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, menjaga kualitas air/sungai, perlu dilaksanakan kegiatan gotong royong.

Masyarakat Kecamatan Kemuning terdiri dari enam (6) kelurahan. Khususnya Kelurahan Pipa Reja terdiri dari RW 7 dan RT 38. Untuk lebih jelasnya wilayah Kelurahan Pipa Reja dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel Data Wilayah Kelurahan Pipa Reja

No.	Rukun Warga/Rukun Tetangga	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)
1.	RW 01 (RT 01, 02, 03, 04,05,29)	1056	980
2.	RW 02 (RT 06, 07, 08, 09,30)	1332	1261
3.	RW 03 (RT 13, 14, 15)	730	625
4.	RW 04 (RT 16, 17, 18, 19, 27, 28, 36, 38)	1661	1537
5.	RW 05 (RT 10, 11, 12,37)	736	756
6.	RW 06 (RT 20, 21, 22)	1012	1013
7.	RW 07 (RT 23,24, 25, 26, 32, 33, 34, 36)	1987	1946
Kelurahan Pipa Reja		8514	8118

Sumber : Kantor Lurah Pipa Reja Tahun 2023

Pelaksanaan Gotong Royong di kelurahan Pipa Reja dilaksanakan 1 bulan setiap hari minggu, dalam bulan April tahun 2024 gotong royong dilaksanakan di RW 007 berdasarkan pengamatan sementara penulis pada saat pelaksanaan gotong royong di RW tersebut, penulis melihat beberapa indikasi masalah yaitu:

1. Tidak Semua warga setiap Rw ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan gotong royong tersebut.
2. Dilhat dari absensi kehadiran, pegawai tidak semuanya hadir

Oleh karena adanya permasalahan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul:

Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2023 Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) di Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 4)

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2023 Pelak-

sanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) di Kelurahan Pipa Reja? (Studi Kasus Pasal 2 ayat 4)

2. Kendala Apa Sajakah yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2023 Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) di Kelurahan Pipa Reja? (Studi Kasus Pasal 2 ayat 4)

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab masalah pokok yang telah dirumuskan pada perumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2023 Pelaksanaan Gotong Royong.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala apa saja yang di hadapi dalam Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2023 Pelaksanaan Gotong Royong.

B. LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Menurut Mulyadi (2015:12), "Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan." Grindle dalam Mulyadi (2015:47) menyatakan: "Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu".

Dalam implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Pada dasarnya implementasi menurut Setiawan (2004:39). "Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif".

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nampak bahwa implementasi tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Model-Model Implementasi Kebijakan

Model adalah bentuk representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model (Suprijono, 2009:45).

Berikut ini beberapa model implementasi dari beberapa tokoh yang dikutip dari Nugroho (2004:494-495).

1. Model Implementasi Donald Van Meter dengan Carl Van Horn.
2. Model Kerangka Analisis Implementasi (*Framework For Implementation Analysis*) dari Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebatier.
3. Model Implementasi Kebijakan dari Elmore, Lipsky, Hjem & O'Porter
4. Model Marilee S. Grindle.
5. Model Implementasi dari George C. Edward III.

Adapun Model Implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi dari Model Marilee S. Grindle.

A. Model George C. Edward III

George C. Edward dalam Indiahono (2009:31-33) model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group) tujuan dan sarana dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.

2. Sumber Daya

Sumber Daya yaitu menunjukkan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun

finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program atau kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksanaan sendiri. Mekanisme implementasi prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan.

Keempat variabel diatas dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain.

B. Model Implementasi Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Mazmanian dan Sabatier dalam Mulyadi, (2018:70-71) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

1. Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), indikatornya:
 - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.
 - b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.
 - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.
 - d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
2. Karakteristik kebijakan/Undang-Undang (*ability of statute to structure implementation*), indikatornya:
 - a. Kejelasan isi kebijakan.
 - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
 - c. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut.
 - d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana.
 - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.

f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.

g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

3. Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), indikatornya:

a. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.

b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.

c. Sikap dari kelompok pemilih.

d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor

Van Meter dan Van Horn dikutip dalam Wibawa et al (1994:71), merumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antar berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Selanjutnya Van Meter dan Van Horn dikutip dalam Subarsono (2005:71) mengemukakan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

1. Standar dan Tujuan,
2. Sumber Daya,
3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivasi,
4. Karakteristik agen pelaksana,
5. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik,
6. Sikap para pelaksana.

Menurut model ini suatu kebijakan menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan. Keberhasilan implementasi pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat tercapainya standar dan sasaran tersebut.

D. Model Implementasi Kebijakan Elmore, Lipsky, Hjem & O'Porter

Model keempat adalah model yang kemukakan Richard Elmore, Michael Lipsky, dan Benny Hjern & David O'Porter (Nugroho, 2008:446). Model ini diberi label "RE, dkk" yang terletak di kuadran "bawah ke puncak" dan lebih berada di "mekanisme pasar". Model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka: tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak- kontak yang mereka miliki.

E. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Model kelima ialah model yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93). Model ini menunjukkan bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan bergantung pada

kegiatan program yang sudah dirancang, adanya pembiayaan cukup, pengaruh dari isi kebijakan (*Content of Policy*) dan konteks implementasi (*Contyex of Implementation*).

Content of Policy (Isi kebijakan) terdiri dari:

- a. *Resources commited* (Sumber daya yang dikerahkan)
- b. *Program implementors* (Pelaksana program)
- c. *Site of decision making* (Kedudukan pembuat kebijakan)
- d. *Extent of change envisioned* (Adanya perubahan yang diinginkan)
- e. *Type of benefit* (Jenis serta manfaat yang dihasilkan)
- f. *Interaset affected* (Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan)

Berdasarkan model rumusan yang dipaparkan oleh Grindle ini bersifat *top-down* bahwa proses implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan karena menghendaki perubahan besar, dipandang tidak populis, dan kebijakan yang kontroversial akan memperoleh respon tidak setuju dari kelompok sasaran, ataupun dari implementornya yang dirasa susah dalam menjalankan kebijakan itu atau merasa dirugikan.

Pengertian Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasa dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Pengertian pelaksanaan menurut Mazmanian dan Sebatier (2014:68), "Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan."

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanaka, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Adapun fungsi pelaksanaan adalah sebagai berikut.

1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
2. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
3. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
4. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

Dalam proses pelaksanaan suatu program sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai. Selain itu dalam proses pelaksanaan sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu sebagai berikut.

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.
3. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun di luar lapangan.

Definisi Gotong Royong

Setiap bangsa dalam sebuah negara pasti memiliki kebudayaan yang khas yang membedakan dari bangsa lainnya. Seperti bangsa Indonesia yang dikenal ramah dan menjunjung tinggi nilai luhur kebudayaan yang diwariskan oleh generasi terdahulu. Salah satu budaya yang masih dipegang oleh masyarakat Indonesia yaitu budaya gotong royong. Budaya yang mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, Gotong Royong memiliki peran yang penting dalam masyarakat, karena gotong royong sebagai suatu perilaku sosial yang dilakukan secara bersama-sama dan tanpa pamrih dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bersama. Melalui gotong royong, masyarakat Kota Palembang dapat menciptakan hubungan sosial yang erat dan saling menguntungkan.

Nilai-nilai yang Terkandung dalam Gotong Royong

Kata nilai biasa digunakan untuk menunjukkan sebuah ukuran atau patokan dan biasanya dianggap sebagai sesuatu yang penting dan berharga. Namun pada tatanan keilmuan khususnya ilmu sosiologi kata nilai diartikan berbeda.

Menurut Setiadi dan Kolip (2011:118-119) “nilai merupakan kumpulan sikap perasaan ataupun anggapan terhadap sesuatu hal yang tentang baik buruk, benar salah, patut tidak patut, hina mulia, maupun penting tidak penting”. Nilai-nilai gotong royong yang terkandung di dalamnya, di antaranya yaitu:

1. Kebersamaan
2. Persatuan.
3. Rela Berkorban
4. Tolong Menolong
5. Sosialisasi

Karakteristik Gotong Royong

Menurut Rahman (2013:77), karakteristik individu adalah ciri khas yang menunjukkan perbedaan seseorang tentang motivasi, inspirasi, kemampuan untuk tetap tegar menghadapi tugas sampai tuntas atau memecahkan masalah atau bagaimana menyesuaikan perubahan yang terkait erat dengan lingkungan yang mempengaruhi kinerja individu. Gotong royong mempunyai beberapa karakteristik yang wajib anda ketahui dan pahami.

Faktor Pendorong dan Penghambat Gotong Royong

Menurut Maryati (2001:4-5) mengungkapkan bahwa secara umum kecenderungan masyarakat untuk berubah disebabkan oleh faktor-faktor berikut :

1. Rasa tidak puas terhadap kesadaran dan situasi yang ada
2. Timbulnya keinginan untuk mengadakan perbaikan
3. Kesadaran akan adanya kekurangan dalam kebudayaan sendiri sehingga berusaha mengadakan perubahan
4. Adanya usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat
5. Banyaknya kesulitan yang dihadapi yang memungkinkan manusia berusaha untuk dapat mengatasinya
6. Tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan adanya keinginan untuk meningkatkan taraf hidup

7. Sikap terbuka dari masyarakat terhadap hal-hal yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat tertentu.

Jenis Gotong Royong

Menurut dokumentasi departemen pendidikan dan kebudayaan (dalam Panjaitan, 2013:43-59) di Indonesia terdapat berbagai jenis gotong royong diantaranya adalah:

1. Gotong royong berburu dan mengumpulkan makanan.
2. Gotong royong bercocok tanam.
3. Gotong royong membuat alat.
4. Gotong royong membuat tempat tinggal
5. Gotong royong dalam kepercayaan

Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2023

Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 adalah setiap proses pemikiran, kegiatan dan tindakan yang direncanakan secara baik, rasional, efisien, dan efektif yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat-pejabat, dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Adapun yang menjadi Peraturan Walikota dikeluarkannya kebijakan Walikota Kota Palembang untuk menangani pelaksanaan gotong royong yaitu Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Gotong Royong. Untuk pembahasan yang mengatur tentang kebijakan pelaksanaan gotong royong yang diatur dalam pasal 2 yaitu untuk gotong royong tingkat mandiri. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4, teknis pelaksanaannya sebagai berikut.

- a. Untuk gotong royong mandiri tingkat RT /RW diikuti masyarakat pada wilayah gotong royong di lingkungan masing-masing;
- b. Ketua RT/RW dan masyarakat melakukan pembersihan sampah, saluran air, fasilitas umum, serta melakukan penghijauan pada lingkungan masing-masing;
- c. Lurah dan jajarannya ikut serta pelaksanaan gotong royong mandiri tingkat RT/RW pada wilayah kerja kelurahan;
- d. Lurah dan jajarannya melakukan pemantauan pelaksanaan gotong royong mandiri tingkat RT /RW;
- e. Camat dan Lurah menyampaikan laporan rekap gotong royong setiap bulan pada minggu pertama bulan berikutnya yang disertai dengan lampiran absensi dan dokumentasi (foto) sebelum pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan gotong royong mandiri tingkat RT/ RW;

- f. Camat dan Lurah berkewajiban mengikuti dan mengawasi pelaksanaan kegiatan gotong royong mandiri tingkat RT/RW hanya di wilayah kerja masing-masing; dan
- g. Untuk absensi pelaksanaan gotong royong tiap minggu pagi yaitu bagi Pegawai Kelurahan disiapkan oleh Petugas Kelurahan masing-masing, selanjutnya disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kerangka Berpikir

Uma Sekaran dalam Sugiyono, (2019:95) mengemukakan bahwa kerangka berpikir

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti (Sapto Haryoko dalam Sugiyono, 2019:95)

Gambar Kerangka Berpikir



C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan (Fahry dkk, 2014). Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian (Sugiyono, 2016:7).

Definisi Konsep

Menurut Siyoto (2015:12) konsep adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alami. Lebih lanjut konsep adalah generalisasi sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan

fenomena yang sama. Berikut penjelasan tentang definisi dari konsep judul penelitian ini.

1. Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan Mulyadi (2015:12).
2. Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat RT/RW adalah gotong royong merupakan adat isitadat tolong menolong antara orang-orang yang ada di berbagai macam lapangan kegiatan sosial baik itu hubungan kekerabatan, tetangga, dan efisien yang bersifat praktis, serta ada pula kerjasama lainnya.

Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan variabel peneliti yang dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum melakukan analisis serta mengetahui sumber pengukuran. Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana mengukur variabel. Adapun definisi operasional dalam skripsi ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Operasionalisasi Konsep

No.	Konsep	Indikator-indikator
1.	Implementasi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya yang dikerahkan 2. Pelaksana program 3. Kedudukan pembuat kebijakan 4. Adanya perubahan yang diinginkan 5. Jenis serta manfaat yang dihasilkan 6. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
	<i>Merilee S. Grindle dalam Subarsono, (2011: 93)</i>	
2.	Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat RT/RW	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gotong Royong Mandiri 2. Peduli Lingkungan 3. Partisipasi Aparatur Pemerintah 4. Monitoring 5. Laporan Kegiatan 6. Evaluasi 7. Absensi
	<i>Sumber : Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 4)</i>	

Informan Penelitian

Menurut Moleong (2015:163) “informan kunci atau informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal.

Informan dari penelitian beberapa orang yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang dijalankan yaitu orang yang benar-benar mengetahui situasi, kondisi dan permasalahan yang diteliti sesuai yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Informan Penelitian

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Lurah Pipa Reja	1 orang
2.	Pegawai atau staf kelurahan	1 orang
3.	Ketua RT	1 orang
4.	Ketua RW	1 orang
5.	Masyarakat	1 orang
	Jumlah	5 orang

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan Sugiyono, (2019:296). Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan atau peninjauan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti dan melaksanakan serangkaian kegiatan pencatatan yang berhubungan dengan objek penelitian

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan tatap wajah antara narasumber dan peneliti guna untuk memperoleh keterangan maupun penjelasan informasi yang akurat secara mendalam.

3. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber dokumentasi untuk data yang diperlukan atau sebagai aktivitas atau proses penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan berbagai sumber informasi.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka ialah metode pengumpulan data kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis).

1. Reduksi Data (*Reduction*)

Reduksi Data adalah proses dimana seorang peneliti perlu melakukan telaahan awal terhadap data-data yang telah dihasilkan, dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian.

2. Display Data (*Display*)

Display Data dapat diartikan sebagai upaya menampilkan, memaparkan atau menyajikan data.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion drawing/ verification*)

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan yang dibuat oleh peneliti masih bersifat sementara, dimana peneliti masih dapat menerima saran dari peneliti lainnya.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Bab ini berisi pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2023 Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Mandiri, Gotong Royong Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) di Kelurahan Pipa Reja (Studi Kasus Pasal 2 ayat 4). Pada bab ini penulis berusaha menganalisa data-data yang didapatkan dari hasil wawancara dan hasil observasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Dengan informan sebanyak 5 orang, maka penulis memperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2023 dalam Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW) di Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 4)

Dalam suatu kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2023 dalam Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW) di Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 4). Kebijakan kontroversial, kebijakan-kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan besar, biasanya akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran bahkan mungkin dari implementornya sendiri yang mungkin merasa kesulitan melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan.

A. Implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut

mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan. Untuk lebih jelasnya lagi ada 6 indikator dari implementasi tersebut.

1. Sumber Daya yang Dikerahkan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan kegiatan gotong royong pemerintah, sumber daya yang dikerahkan adalah pegawai dan masyarakat selain itu juga sarana seperti, mobil sampah, gerobak dorong, cangkul, sapu lidi. Supaya kegiatan gotong royong berjalan dengan lancar dan aman.

2. Pelaksana Program

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diperoleh jawaban bahwa untuk Pelaksana Program Gotong Royong Program Gotong Royong ini diikuti seluruh jajaran pegawai kecamatan maupun kelurahan serta pak camat juga ikut turun langsung kelapangan untuk melaksanakan kegiatan gotong royong, agar pelaksanaan gotong royong tersebut aman dan lancar.

3. Kedudukan Pembuat Kebijakan

Pembuat kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum.

Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Kebijakan ini bukan saja pemerintah yang menjalankannya tetapi masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan.

Berdasarkan hasil jawaban penelitian di atas menunjukkan bahwa Kebijakan dalam pelaksanaan gotong royong mengacu ke Perwako, adapun pembuat kebijakan ini adalah walikota dan kebijakan tersebut ditindaklanjuti oleh camat dan lurah sebagai pelaksana program gotong royong.

4. Adanya Perubahan yang Diinginkan

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diperoleh bahwa perubahan yang diinginkan dalam kegiatan gotong royong adalah lingkungan yang bersih dan sejuk, dan tidak ada lagi warga yang terserang penyakit.

5. Jenis Serta Manfaat yang Dihasilkan

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas dapat diperoleh jawaban bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dalam gotong royong ingin adanya perubahan yang bagus seperti, kolam rentensi yang tadinya bertumpukan sampah menjadi bersih dan warga bisa melakukan aktivitas memancing dengan aman dan tentram.

6. Kepentingan yang Terpengaruhi oleh Kebijakan

Berdasarkan pernyataan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan Program gotong royong mempunyai dua kepentingan yaitu kepentingan pemerintah dan masyarakat, kepentingan pemerintah salah satunya adalah mendorong partisipasi atau semangat masyarakat untuk melakukan kegiatan gotong royong, sedangkan kepentingan masyarakat dalam kegiatan gotong royong adalah untuk menjaga lingkungan menjadi bersih dan menjaga tali silahtruahmi antar masyarakat.

B. Pelaksanaan Gotong Royong

Dalam melakukan pelaksanaan gotong royong langkah yang dilakukan. Berikut hasil penelitian tentang pelaksanaan gotong royong:

1. Gotong Royong Mandiri

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diperoleh informasi bahwa Kegiatan Program Gotong Royong tingkat mandiri dilakukan secara murni tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan kegiatan gotong royong dilakukan secara rutin sesuai dengan agenda yang ada.

2. Peduli Lingkungan

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan gotong royong dilakukan sebagai wujud pedulinya masyarakat dengan lingkungan mereka.

3. Partisipasi Aparatur Pemerintah

Partisipasi ASN sangat penting agar para penyelenggara pelayanan publik dapat lebih mengenal warganya, termasuk cara berpikir dan kebiasaan hidup warga masyarakatnya, masalah yang dihadapinya, apa yang disumbangkan dalam memecahkan masalah yang dihadapinya dan lain-lain.

Gambar Kegiatan Gotong Royong



Sumber: Dokumentasi Peneliti 2024

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi aparat pemerintah sangat penting dalam membantu melancarkan kegiatan gotong royong walaupun tidak semua aparat pemerintah yang hadir.

4. Monitoring

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa Camat dan Lurah serta jajarannya memonitoring dan membantu warga dalam kegiatan gotong royong dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar dan aman.

5. Laporan Kegiatan

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat dan ketua RW ataupun RT membuat laporan kegiatan gotong royong dan laporan tersebut dilaporkan kepihak kecamatan kegiatan tersebut terlaksana atau tidak.

6. Evaluasi

Setelah kegiatan gotong royong selesai dilaksanakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai, agar dapat ditingkatkan kualitasnya di masa yang akan datang.

Gambar Sebelum dibersihkan Sesudah dibersihkan



Sumber: Dokumentasi Peneliti 2024

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa setelah kegiatan gotong royong Camat dan lurah juga melakukan evaluasi lingkungan yang sudah dibersihkan dan melihat adanya perubahan lingkungan yang tadinya kotor menjadi bersih setelah dilakukan gotong royong.

1. Absensi

Untuk absensi pelaksanaan gotong royong tiap minggu pagi yaitu bagi pegawai kelurahan disiapkan oleh petugas Kelurahan Pipa Reja, selanjutnya disampaikan Kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Gambar Absensi Pegawai

N O	NAMA	JABATAN GOLONGAN	TANDA TANGAN	KET
1	SURHAN PARDI, SE., MSI NIP. 196806051988031004	LURAH IV-A	[Signature]	
2	RIANA YUSUF S.IP.,MSI NIP. 198605052011012010	SEKUR IIIe	[Signature]	
3	SUSI AWATI, S.Sos NIP. 197805142009032001	KASI PAK IIIe	[Signature]	
4	MAPRIADI ALAMSYAH, SE NIP. 197104072014071002	KASI TRANTIB IIIe	[Signature]	
5	TORNADOSE NIP. 19880517201001106	STAF IIIb	[Signature]	
6	EDI SUPOLO NIP. 197801122007011010	STAF IIIe	[Signature]	
7	RIZAL EFFENDE	PEGAWAI HONORER	[Signature]	
8	HALIMAH ERLEYATI, S.Sos	PEGAWAI HONORER	[Signature]	
9	RISMA YUNIARTI A.R, SE	PEGAWAI HONORER	[Signature]	
10	MUSLIKHAN	PEGAWAI HONORER	[Signature]	
11	YUDI KURNIAWAN, AMM	PEGAWAI HONORER	[Signature]	

Sumber: Kelurahan Pipa Reja 2024
Gambar Absensi Masyarakat

Sumber : Kelurahan Pipa Reja 2024

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kehadiran atau absensi dalam kegiatan gotong royong sangatlah penting untuk melihat antusias masyarakat ataupun pegawai dari kelurahan pipa reja karena absensi tersebut akan dilaporkan ke pihak kecamatan.

Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Pelaksanaan Gotong Royong

Untuk tetap menjaga pelaksanaan kegiatan gotong royong dalam masyarakat, peran aktif dan kesadaran akan tanggung jawab setiap anggota masyarakat sangat penting untuk dimiliki oleh setiap anggota warga. Kendala yang di hadapi dalam mengimplementasikan pelaksanaan gotong royong di kelurahan pipa reja terutama di RW 007 kurangnya partisipasi dari masyarakat dan

kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaan gotong royong tersebut, dan masih ada masyarakat yang mementingkan urusan pribadi daripada kepentingan umum.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat atau kendala yang ada di dalam kegiatan gotong royong ini adalah sumber daya manusia yang tidak peduli dengan himbauan kegiatan gotong royong padahal tujuannya untuk kepentingan bersama bukan hanya untuk mementingkan urusan pribadi.

Pembahasan

Hasil penelitian dapat dilihat kembali pada teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Implementasi menurut Merilee S. Grindle, yang selanjutnya digunakan sebagai indikator untuk mengukur Implementasi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 dalam Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Mandiri, Tingkat Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW) di Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 4).

Implementasi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 dalam Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW) di Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 4)

Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. ”Grindle dalam Mulyadi (2015:47) menyatakan: “Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”.

Implementasi merupakan tahap dari kebijakan publik sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting (*critical satage*). Disebut penting karena tahapan ini merupakan “jembatan” antara dunia konsep dengan dunia realita (Erwan dkk, 2012:65).

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93). dipengaruhi oleh isi kebijakan yang mencakup sebagai berikut:

1. Sumber Daya yang Dikerahkan

Sumber daya dalam implementasi merupakan suatu peraturan dan juga berperan penting untuk pencapaian tujuan Dalam hal ini yang menjadi sumber daya adalah sumber daya manusia (SDM). Dalam hal implementasi semua warga mau pun pegawai terlibat sebagai pelaksana dari kebijakan yang di implementasikan.

Berdasarkan dari hasil penelitian di Kelurahan Pipa Reja penulis membahas bahwa ketersediaan Sumber Daya Manusia di Kelurahan Pipa Reja Kota Palembang subjektif atau bisa dikatakan kurang dalam partisipasinya untuk pelaksanaan gotong royong sehingga implementasi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 dalam Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW) di Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 4) Kota Palembang belum efektif.

Untuk mengimplementasikan kebijakan sangat dibutuhkan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan kebijakan, adanya sumber daya manusia yang menjamin bahwa kebijakan dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan Sumber daya yang di maksud yaitu pegawai ataupun masyarakat personil Kelurahan Pipa Reja untuk menjalankan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 dalam Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW) di Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Kota Palembang ketertiban masyarakat baik segi kualitas maupun kuantitasnya.

2. Pelaksana Program

Dalam penyampaian Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 dalam Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW) di Kelurahan Pipa Reja karakter yang penting dimiliki oleh pelaksanaan program kebijakan adalah kejujuran dan tingkat komitmen yang senantiasa konsisten.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis membahas bahwa Pelaksana Program merupakan sikap dari pelaksana kebijakan yaitu mencakup kewenangan, sikap, karakter dari implementor utama kebijakan kepada masyarakat. Jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana program tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Dukungan dan kemampuan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sangat mempengaruhi proses Implementasi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 dalam Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW) di Kelurahan Pipa Reja

Masyarakat Karakter yang ditujukan dimiliki pelaksana adalah kejujuran dan tingkat komitmen yang senantiasa konsisten.

3. Kedudukan Pembuat Kebijakan

Pembuatan kebijakan bertalian dengan semua masalah bertalian tidak dapat diamati sendirian oleh pemerintah. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memutuskan semua isu (masalah) yang timbul. Partisipasi masyarakat disini menjadi amat penting berwujud pemberian saran, kritik, pemikiran bagi pemerintah (pembuat kebijakan) untuk bersama-sama memikirkan alternatif-alternatif guna mendapatkan cara-cara terbaik bagi Pemecahan masalah dengan menetapkan kebijakan tertentu, ikut melaksanakannya dan menikmati hasilnya. Tanpa partisipasi masyarakat itu, kebijakan itu kurang bermakna.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis membahas kedudukan yang telah ada sesuai dengan kebijakan sebaiknya memang harus ditaati dan diikuti karena dengan adanya kebijakan tersebut masyarakat dan pegawai pun bisa ikut partisipasi dalam pelaksanaan gotong royong ini.

4. Adanya Perubahan yang Diinginkan

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, karena sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan bantuan orang lain dengan melakukan interaksi dengan orang lain atau masyarakat setempat. Perubahan sebagai suatu kemajuan adalah perubahan yang memberi dan membawa kemajuan pada masyarakat. Hal ini tentu sangat diharapkan karena kemajuan itu bisa memberikan keuntungan dan berbagai kemudahan pada manusia.

Dalam kegiatan gotong royong ini kesadaran diri harus ada karena dengan adanya perubahan yang diinginkan kita sebagai masyarakat ataupun pegawai harus kompak dalam kegiatan ini. Karena dalam hal ini kepentingan bukan untuk diri sendiri melainkan untuk semua yang ikut serta dalam kegiatan gotong royong.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis membahas semua ingin adanya perubahan dalam kegiatan gotong royong ini supaya tercapai tujuan yang sudah ada membuat lingkungan menjadi bersih, aman, dan sejahtera. Masyarakat pun senang adanya perubahan yang diinginkan.

5. Jenis Serta Manfaat yang Dihasilkan

Salah satu tujuan dari adanya gotong royong adalah nilainya. Dimana akan ada semangat yang dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan ataupun perilaku secara individu. Mereka akan bersatu

untuk melakukan sebuah kegiatan secara bersama-sama demi kepentingan bersama tanpa mengharapkan imbalan atau balasan.

Dalam kegiatan gotong royong sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama. Di dalam kegiatan gotong royong, semua kegiatan dan pekerjaan akan dilakukan secara bersama. Tanpa membedakan atau memandang kedudukan serta derajat seseorang.

Gotong royong dilakukan supaya lingkungan disekitar kita bisa terlihat lebih bersih, nyaman, serta indah, Keamanan lingkungan sekitar rumah menjadi lebih aman, sebab semua warga sudah saling mengenal. Kedamaian serta ketentraman hidup bermasyarakat akan lebih terasa, sebab semua warga sudah mengenal satu sama lain.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis membahas membuat masyarakat menjadi semakin kompak dan dapat mengenal satu sama lain. Dengan adanya kegiatan tersebut, masyarakat akan lebih mudah untuk saling menolong.

6. Kepentingan yang Terpengaruhi oleh Kebijakan

Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan merupakan salah satu unsur penting dalam gotong royong. Karena mengacu pada rasa saling mendukung dan bekerja bersama dalam kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat. Dalam suasana kebersamaan, setiap individu dihargai dan merasa diterima oleh lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian menulis kebijakan sangat penting harus di taati dan harus dilaksanakan sesuai kepentingan masing-masing. Supaya masyarakat merasa aman dan damai jika sesuatu saat terjadi hal yang aneh.

Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 dalam Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW) di Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 4).

Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 adalah setiap proses pemikiran, kegiatan dan tindakan yang direncanakan secara baik, rasional, efisien, dan efektif yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat-pejabat, dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Adapun yang menjadi Peraturan Walikota dikeluarkannya kebijakan Walikota Kota

Palembang untuk menangani pelaksanaan gotong royong yaitu Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Gotong Royong. Untuk pembahasan yang mengatur tentang kebijakan pelaksanaan gotong royong yang diatur dalam pasal 2 yaitu untuk gotong royong tingkat mandiri. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4, teknis pelaksanaannya sebagai berikut.

1. Gotong Royong Mandiri

Gotong Royong Mandiri adalah gotong royong yang kegiatannya direncanakan secara sederhana dan dilaksanakan bersama oleh masyarakat secara swadaya murni atau partisipasi suka rela dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingan bersama anggota masyarakat.

Untuk gotong royong mandiri tingkat RT /RW diikuti masyarakat pada wilayah gotong royong di lingkungan masing-masing.

2. Peduli Lingkungan

Peduli terhadap lingkungan berarti ikut melestarikan lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya, bisa dengan cara memelihara, mengelola, memulihkan serta menjaga lingkungan hidup.

Menurut Narwanti (2011) berpendapat bahwa peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam dan sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

Peduli terhadap lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang berupaya untuk mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan juga berupaya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan alam yang sudah terjadi.

3. Partisipasi Aparatur Pemerintah

Menurut Chabib Soleh (2014:111) "partisipasi dimaknai sebagai ketertiban seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan". Ketertiban tersebut umumnya didorong oleh suatu kesadaran dan kesukarelaan untuk ikut memperbaiki keadaan.

Partipasi Aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan gotong royong sudah berjalan dengan baik dalam memberikan arahan serta motivasi untuk melaksanakan kegiatan gotong royong.

4. Monitoring

Kegiatan monitoring dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil capaian saat dilaksanakan monitoring tersebut. Monitoring juga dilakukan dalam rangka

mengetahui permasalahan yang terjadi selama kegiatan yang telah dijalankan.

Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu.

5. Laporan Kegiatan

Laporan kegiatan adalah sejumlah informasi yang diberikan kepada atasan dengan tujuan sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan yang telah dilakukan sehingga pembuatan laporan kegiatan biasanya dilakukan ketika sebuah acara atau kegiatan telah selesai dilaksanakan.

Camat dan Lurah menyampaikan laporan rekap gotong royong setiap bulan pada minggu pertama bulan berikutnya yang disertai dengan lampiran absensi dan dokumentasi (foto) sebelum pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan gotong royong mandiri tingkat RT/ RW.

6. Evaluasi

Mohammad Ali (2014) mengatakan bahwa evaluasi merupakan suatu kegiatan yang biasanya dilakukan untuk membuat penilaian terhadap kelayakan suatu perencanaan, implementasi, dan hasil suatu program atau kebijakan.

Camat dan Lurah berkewajiban mengikuti dan mengawasi pelaksanaan kegiatan gotong royong mandiri tingkat RT/RW hanya di wilayah kerja masing-masing.

Evaluasi adalah proses yang mengkaji secara kritis suatu program, aktivitas, kebijakan, atau semacamnya. Hal ini melibatkan pengumpulan informasi tentang kegiatan dan hasil program. Tujuannya untuk membuat penilaian tentang suatu program, meningkatkan efektivitasnya, dan untuk pertimbangan keputusan.

7. Absensi

Absensi adalah istilah yang mengacu pada ketidakhadiran atau tidak berpartisipasi seseorang dalam suatu kegiatan tertentu. Untuk absensi pelaksanaan gotong royong tiap minggu pagi yaitu bagi Pegawai Kelurahan disiapkan oleh Petugas Kelurahan masing-masing, selanjutnya disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Absensi menurut Nugroho dalam Santoso dan Yulianto (2017:67) Absensi adalah sebuah pembuatan data untuk daftar kehadiran yang biasa digunakan bagi sebuah lembaga atau instansi yang sangat perlu membutuhkan sistem seperti ini.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan pelaksanaan gotong royong tingkat mandiri tingkat RT dan RW sudah berjalan tetapi belum maksimal sebab dilihat dari indikator sumber daya yang dikerahkan yaitu masyarakat dan pegawai tidak selalu hadir dalam kegiatan pelaksanaan gotong royong dan sarana atau alat-alat untuk kegiatan gotong royong masih terbatas.
2. Faktor penghambat atau kendala yang ada di dalam kegiatan gotong royong ini adalah belum maksimalnya partisipasi aparatur pemerintah karena tidak semua aparatur turut hadir dalam kegiatan gotong royong tersebut.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi Kelurahan Pipa Reja dalam menerapkan kebijakan khususnya di kawasan RT yaitu:

1. Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan sumber daya yang dikerahkan untuk pelaksanaan gotong royong supaya pelaksanaan tersebut berjalan dengan lancar dan memberikan informasi ataupun penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat seputar tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, agar masyarakat dapat mengerti bagaimana menjaga lingkungan supaya bersih.
2. Aparatur Pemeintah hendaknya menyadari bahwa dalam kegiatan pelaksanaan gotong royong harus ikut berperan dan aktif karena merupakan suatu kewajiban dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara bersama-sama untuk menjaga lingkungan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah. 2011. Gotong Royong Cermin Budaya Bangsa Dalam Arus Globalisasi. Yogyakarta: STMIK Amikom.
- Abdullah, M. 2014. Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan. Yogyakarta : Penerbit Aswaja Pressindo.
- Agus Purwanto, Erwan. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media.
- Elly M. Setiadi & Usman Kolip. 2011. Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala

- Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya. Jakarta : Kencana.
- Irfan, M. 2016. *Metamorfosis Gotong Royong dalam Pandangan Konstruksi Sosial*. Seminar Nasional Menuju Masyarakat Indonesia Sejahtera. Bandung.
- Jaya, I Made Laut Mertha. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Panjaitan, Merphin. 2013. *Dari Gotong Royong ke Pancasila*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Priyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. ed. Teddy Chandra. Sidoarjo: Zifatama Publishing.
- Rahman, A. A. 2013. *Psikologi Sosial: Integrasi Pengetahuan Wahyu dan Pengetahuan Empirik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sayidiman Suryohadiprojo. 2016. *Budaya Gotong Royong*. Jakarta : Kompas Setiawan Guntur.
2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Siyoto, S. & Sodik, A. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian, Literasi Media Publishing*. Yogyakarta.
- Sudrajat, Ajat. 2014. *Nilai-Nilai Budaya Gotong Royong Etnik Betawi Sebagai Sumber Pembelajaran IPS*. Disertasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Devolepment*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2019. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tjokroadmudjoyo dalam Dwi Purnama Wati. 2014. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam*. Lampung: Universitas Lampung.

Sumber Jurnal :

Karimah, U., Y. N, Anggowo, S, Falah dan Suryani. 2011. *Isolasi Oligosakarida Madu Lokal dan Analisis Aktivitas Prebiotiknya*. *Jurnal Gizi dan Pangan*. Departemen Biokimia FMIPA IPB. Bogor.

Sumber Lainnya :

Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Mandiri, Tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga.